

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Surakarta

2.1.1. Kondisi Wilayah

1) Kedudukan

Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan.

Gambar 2.1.

Peta Kota Surakarta



Sumber: <https://surakartakota.bps.go.id/> (2019)

Surakarta lebih dikenal dengan nama “Solo” atau “Sala” adalah dusun yang dipilih oleh Sultan Pakubuwana II ketika akan mendirikan istana yang baru, setelah perang suksesi Mataram terjadi di Kartasura. Nama ini ternyata trend dipakai secara luas sampai sekarang bahkan memiliki konotasi kultural. Nama “Surakarta”, yang sekarang dipakai sebagai nama administrasi yang mulai dipakai ketika Kasunanan didirikan, sebagai kelanjutan monarki Kartasura.

Pada masa sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal-pemerintahan, sedangkan nama Sala/Solo lebih umum penggunaannya. Kata sura dalam bahasa Jawa berarti “keberanian” dan karta berarti “sempurna”/ “penuh”. Dapat pula dikatakan bahwa nama Surakarta merupakan permainan kata dari Kartasura. Kata sala, nama desa yang dipakai untuk tempat istana baru dibangun.

Surakarta memiliki semboyan “Berseri”, akronim dari “Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah”, sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Solo mengambil slogan pariwisata Solo, *The Spirit of Java* (Jiwanya Jawa) sebagai upaya pencitraan kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Selain itu Kota Solo juga memiliki beberapa julukan, antara lain Kota Batik, Kota Budaya, Kota Liwet Penduduk Solo disebut sebagai wong Solo, dan istilah putri Solo juga banyak digunakan untuk menyebut wanita yang memiliki karakteristik mirip wanita dari Solo.

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 503.421 jiwa, terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, yang tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan dengan daerah seluas 44,1 km². Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-

laki Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Catatan dari tahun 1880 memberikan cacah penduduk 124.041 jiwa. Pertumbuhan penduduk dalam kurung 10 tahun terakhir berkisar 0,565 % per tahun. Tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.370 jiwa/km², yang merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah (kepadatan Jawa Tengah hanya 992 jiwa/km²). Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke-13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia.

Industri batik menjadi salah satu industri khas Solo. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Perdagangan di Solo berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan Selain Pasar Klewer, Solo juga memiliki banyak pasar tradisional, di antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan Pasar Kembang. Pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan nama-nama dalam bahasa Jawa, antara lain nama pasaran (hari) dalam bahasa Jawa: Pasar Pon, Pasar Legi, sementara pasar Kliwon saat ini menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi Pasar Sangkrah. Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu (setiap sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cenderamata Alun – alun utara Keraton Solo.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2018

Kecamatan		Luas (km ²)	Persentase
Subdistrict		Total Area (square.km)	Percentage
(1)		(2)	(3)
1	Laweyan	8,64	19,62
2	Serengan	3,19	7,24
3	Pasar Kliwon	4,82	10,95
4	Jebres	12,58	28,56
5	Banjarsari	14,81	33,63
Surakarta		44,04	100

Sumber: <https://surakartakota.bps.go.id/> (2019)

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa luas wilayah Kota Surakarta Tahun 2018 berdasarkan kecamatan yaitu Laweyan seluas 8,64 km², Serengan seluas 3,19 km², Pasar Kliwon 4,82 km², Jebres 12,58 km², dan Banjarsari 14,81 km².

2) Demografi

Tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta pada tahun 2018 mencapai 11.759,31 jiwa/km². Tahun 2018 Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Pasar Kliwon yang mencapai angka 15.996,64. Dengan tingkat

kepadatan yang tinggi akan berdampak pada masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan dan juga tingkat kriminalitas.

Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta 2010, 2017, dan 2018

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
	2010	2017	2018	2010- 2018	2017- 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Laweyan	86.208	88.947	89.254	0,435	0,345
2 Serengan	43.731	45.119	45.275	0,435	0,346
3 Pasar Kliwon	74.396	76.760	77.027	0,435	0,348
4 Jebres	138.292	142.686	143.180	0,435	0,346
5 Banjarsari	157.584	162.590	163.151	0,435	0,345
Surakarta	500.211	516.102	517.887	0,435	0,346

Sumber: <https://surakartakota.bps.go.id/> (2019)

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kota Surakarta tahun 2017 adalah sebanyak 516.102 jiwa dengan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarsari sebanyak 162.590 jiwa. Pada tahun 2018 mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,346% menjadi 517.887 jiwa.

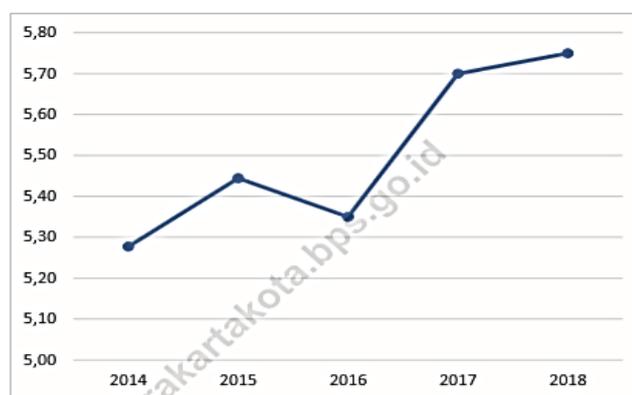
2.1.2. Perekonomian

1) Pertumbuhan PDRB

Mulai tahun 2014 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010. Pada tahun 2018 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Surakarta mencapai 44,428 trilyun rupiah, naik 7,62 persen dari tahun sebelumnya. Struktur perekonomian di Kota Surakarta dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB kota. Pada tahun 2018 lapangan usaha konstruksi masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Surakarta yaitu sebesar 27,14 persen, disusul lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda Motor sebesar 22,15 persen. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh lapangan usaha 11,67 persen. Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 0,15 persen.

Diagram 2.1.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber: <https://surakartakota.bps.go.id/> (2019)

2) Laju Inflasi

Tabel 2.3.

Perkembangan Inflasi Tahun Kalender 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018 (persen)

No	Wilayah Jateng	Inflasi 35 Kab / Kota Jawa Tengah			
		2015	2016	2017	2018
*	PROVINSI JAWA TENGAH	2.73	2.36	3.71	2.82
1	Kabupaten Purworejo	3.45	2.66	4.29	-
2	Kabupaten Jepara	4.57	3.45	2.83	4.2
3	Kabupaten Wonosobo	2.71	2.97	3.21	3.52
4	Kabupaten Cilacap	2.63	2.77	4.41	3.21
5	Kabupaten Kudus	3.28	2.32	4.17	3.11
6	Kabupaten Brebes	3.08	2.84	4.24	3.09
7	Kota Tegal	3.95	2.71	4.03	3.08
8	Kabupaten Banjarnegara	2.97	2.87	3.67	3.04
9	Kabupaten Purbalingga	1.62	2.39	3.72	3.01
10	Kabupaten Kebumen	2.91	2.71	3.25	3.01
11	Kabupaten Banyumas	2.52	2.42	3.91	2.98
12	Kabupaten Pemalang	3.52	2.33	3.64	2.95
13	Kabupaten Tegal	3.64	2.67	3.58	2.95
14	Kota Pekalongan	3.46	2.94	3.61	2.92
15	Kabupaten Grobogan	3.31	2.41	4.05	2.89
16	Kabupaten Temanggung	2.74	2.42	3.12	2.89
17	Kabupaten Pekalongan	3.42	2.96	4.01	2.83
18	Kabupaten Semarang	2.85	2.39	3.67	2.8
19	Kabupaten Blora	2.85	2.14	2.98	2.78
20	Kabupaten Pati	3.23	2.31	3.51	2.77
21	Kota Surakarta	2.56	2.32	3.64	2.76
22	Kabupaten Demak	2.8	2.27	3.57	2.73
23	Kabupaten Magelang	3.6	2.86	3.47	2.66
24	Kota Magelang	2.7	2.25	3.9	2.65
25	Kabupaten Wonogiri	2.13	2.94	2.32	2.63
26	Kabupaten Rembang	2.66	1.75	3.31	2.53
27	Kabupaten Sragen	3.05	2.49	3.18	2.49
28	Kabupaten Karanganyar	2.4	1.93	3.15	2.48
29	Kota Salatiga	2.61	2.19	3.5	2.47
30	Kota Surakarta	2.56	2.15	3.1	2.45
31	Kabupaten Klaten	2.57	2.31	3.12	2.39
32	Kabupaten Batang	2.94	2.24	3.44	2.36
33	Kabupaten Sukoharjo	2.69	2.34	3.4	2.31
34	Kabupaten Boyolali	2.58	2.65	3.08	2.19
35	Kabupaten Kendal	4.13	2.47	3.6	2.16

Sumber: <https://surakartakota.bps.go.id/> (2019)

Dari data tabel 2.3. dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi Tahun 2016-2018 Kota Surakarta menduduki peringkat ke 6 terendah dari 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.3. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja, guna mewujudkan visi dan misi. Berikut merupakan gambaran secara umum mengenai APBD Kota Surakarta dalam kurun waktu 6 tahun terakhir:

- 1) Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan pola anggaran defisit sebesar 145.120.467.350,- dan dalam pelaksanaannya terealisasi surplus sebesar Rp. 9.700.249.208,-. Hal itu terjadi karena realisasi belanja sebesar 1.375.304.857.300,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.385.005.106.508,-.
- 2) Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan pola anggaran defisit Rp. 133.722.922.732,- dan dalam pelaksanaannya terealisasi surplus sebesar Rp. 45.747.948.486,19,-. Hal itu terjadi karena realisasi belanja Rp. 1.479.827.902.466,63,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang sebesar Rp. 1.525.575.850.952,82,-.
- 3) Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan pola anggaran defisit sebesar Rp. 185.287.176.270.00,- dan dalam pelaksanaannya terealisasi

surplus sebesar Rp. 35.955.589.552.07,-. Hal itu terjadi karena realisasi belanja sebesar Rp. 1.532.527.097.064.00,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang sebesar Rp. 1.568.482.686.616.07,-

4) Pemerintah Kota Surakarta mengajukan APBD Perubahan Kota Surakarta Tahun 2016 dengan anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.875.301.335.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 1.739.755.264.000,- dan belanja daerah sebesar Rp. 2.033.031.082.604,- dari sebelumnya sebesar Rp. 1.795.120.219.000,- sehingga terjadi defisit Rp. 157.729.747.604,-. Estimasi perubahan pendapatan daerah sebesar Rp. 172.297.487.005,- tersebut didukung oleh pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

5) Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan pola anggaran defisit sebesar Rp. 190.610.963.492,26,- dan dalam pelaksanaannya terealisasi surplus sebesar Rp. 35.568.458.842,91,- Hal itu terjadi karena realisasi belanja sebesar Rp. 1.768.346.964.316,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang sebesar Rp. 1.803.915.423.158,91,-

3) Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan pola anggaran defisit sebesar Rp. 224.355.955.414,17,- dan dalam pelaksanaannya terealisasi surplus sebesar Rp. 35.762.377.716,91,-. Hal itu terjadi karena realisasi belanja sebesar Rp. 1.914.818.394.396,00,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang sebesar 1.879.056.016.679,09,-.

2.1.4. Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, kesempatan kerja, dan kriminalitas.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM yang terdiri dari indeks pendidikan (angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah), indeks kesehatan (angka usia harapan hidup), dan indeks ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Pada tahun 2013 IPM Kota Surakarta telah mencapai skor 78.89%, mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 0,45 menjadi 79.34%, kemudian pada tahun 2015 sebesar 80.14%, pada tahun 2016 sebesar 80.76%, serta pada tahun 2017 sebesar 80.85% dan yang terakhir pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,60 menjadi 81.46%.

A. Indeks Pendidikan

A.1. Harapan lama sekolah

Kota Surakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 harapan lama sekolah untuk Kota Surakarta sebesar 13,64% dan naik sebesar 0,28 menjadi sebesar 13,92 pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 sebesar 14,14%, tahun 2016 sebesar 14,50%, tahun 2017 sebesar 14,51, dan terakhir pada tahun 2018 sebesar 14,52. Kenaikan terbesar pada tahun 2016 yaitu yang semula pada tahun 2015 angka harapan sekolah di Kota Surakarta hanya 14,14% menjadi 14,50% pada tahun 2016 sehingga naik sebesar 0,36.

A.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah untuk Kota Surakarta juga selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dimulai pada tahun 2013 dimana angka rata-rata

lama sekolah mencapai 10,25%, pada tahun 2014 sebesar 10,33%, pada tahun 2015 naik menjadi 10,36%, pada tahun 2016 sebesar 10,37%, tahun 2017 sebesar 10,38, dan pada tahun 2018 naik sebesar 0,15 menjadi 10,53%.

A.3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah Kota Surakarta untuk usia 7-12 tahun pada tahun 2013 sebesar 99,82%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,22 menjadi 99,60%, pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 100%, tahun 2016 sebesar 98,91, dan pada tahun 2017 sebesar 99,15%.

Angka partisipasi sekolah Kota Surakarta untuk usia 13-15 tahun pada tahun pada tahun 2013 sebesar 95,79%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,42 menjadi 97,21%, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,87 menjadi 96,34%, tahun 2016 sebesar 99,22%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 97,83%.

Angka partisipasi sekolah Kota Surakarta untuk usia 15-18 tahun pada tahun tahun pada tahun 2013 sebesar 69,42%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,8 menjadi 81,22%, pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 82,89%, tahun 2016 sebesar 86,48%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 70,06%.

B Indeks Kesehatan

B.1. Angka Kesakitan

Angka kesakitan untuk Kota Surakarta pada tahun 2013 sebesar 7,93%, tahun 2014 sebesar 7,27%, tahun 2015 meningkat drastis sebesar 10,11 menjadi

17,38%, tahun 2016 menurun sebesar 4,63 menjadi 12,75%, dan tahun 2017 sebesar 10,83%.

B.2. Rata-Rata Lama Sakit

Rata-rata lama sakit (hari) untuk Kota Surakarta pada tahun 2013 sebesar 5,85%, tahun 2014 menjadi 34,92% yang berarti mengalami lonjakan sebesar 29,07. Pada tahun 2015 menurun menjadi 5,60%, tahun 2016 sebesar 5,37%, dan tahun 2017 sebesar 5,55%.

C. Ketenagakerjaan

C.1. Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta yang terdiri dari bekerja, pengangguran terbuka, dan total Angkatan kerja, pada tahun 2013 yang bekerja sebesar 266.748, tahun 2014 sebesar 258.234, tahun 2015 sebesar 271.199, tahun 2017 sebesar 259.394, dan tahun 2018 sebesar 259.465.

Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2013 sebesar 20.763, tahun 2014 sebesar 16.957, tahun 2015 sebesar 12.877, tahun 2017 sebesar 12.133, dan tahun 2018 sebesar 11.910.

Untuk total Angkatan kerja Kota Surakarta tahun 2013 sebesar 287.511, tahun 2014 sebesar 275.191, tahun 2015 sebesar 284.076, tahun 2017 sebesar 271.527, dan tahun 2018 sebesar 271.375.

C.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Surakarta pada tahun 2013 sebesar 72.10%, tahun 2014 sebesar 68,48%, tahun 2015 sebesar 70.12%, tahun 2017 sebesar 66.10%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 65,62%

C.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta tahun 2013 sebesar 7,22%, tahun 2014 sebesar 6,16%, tahun 2015 sebesar 4,53%, tahun 2017 sebesar 4,47%, dan tahun 2018 sebesar 4,39%

2) Kemiskinan

a. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Jika jumlah penduduk miskin tahun 2014 masih sebanyak 55,9 ribu jiwa, maka pada tahun 2018 penduduk miskin menurun menjadi 47 ribu jiwa. Sehingga selama 5 tahun penduduk miskin menurun sebesar 8,9 ribu jiwa. Rasio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk Kota Surakarta juga semakin menurun selama 5 tahun terakhir ini. Jika di tahun 2014 prosentase penduduk miskin adalah sebesar 10,95%, di tahun 2018 prosentasenya menurun menjadi 9,08% atau berkurang 1,87%. Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin tersebut merupakan hasil dari berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta yang dilaksanakan semakin menyentuh langsung masyarakat miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan.

3) Kesempatan Kerja

a. Rasio penduduk yang bekerja di tahun 2018 tercatat sebesar 66,52% dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dari 6,16% di tahun 2014 menjadi 4,39% di tahun 2018.

kandidat yang bertarung pada pilwali Surakarta 2015, yaitu F.X. Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Anung Indro Susanto dan Muhammad Fajri yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Pasangan F.X. Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo mengalahkan Anung Indro Susanto dan Muhammad Fajri dengan dengan perolehan suara sebesar 60,39%.

Visi dan Misi yang diterapkan menjadi arah pijakan bagi rencana pengembangan Kota Surakarta selama 5 tahun ke depan dengan dua pendekatan yaitu: menguraikan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai visi serta mengidentifikasi cara-cara untuk meminimalkan atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Kota Surakarta. Dari pendekatan tersebut akan dirangkum dalam program dan kegiatan yang lebih dekat kepada rakyat dan mengembangkan berbagai macam solusi-solusi baru untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah kota.

Berdasarkan berbagai aspek pembangunan yang menjadi kajian dalam penetapan Visi dan Misi, maka visi yang ditetapkan adalah: “Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera”. Sedangkan misi yang diusung oleh F.X. Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo dijabarkan dalam 5 misi yaitu:

1) Misi Waras mendukung:

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat produktif, kreatif dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

2) Misi Wasis mendukung:

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota

3) Misi Wareg mendukung:

Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota

4) Misi Mapan mendukung:

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani

5) Misi Papan mendukung:

Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan

2.2.2. Sekretariat Daerah

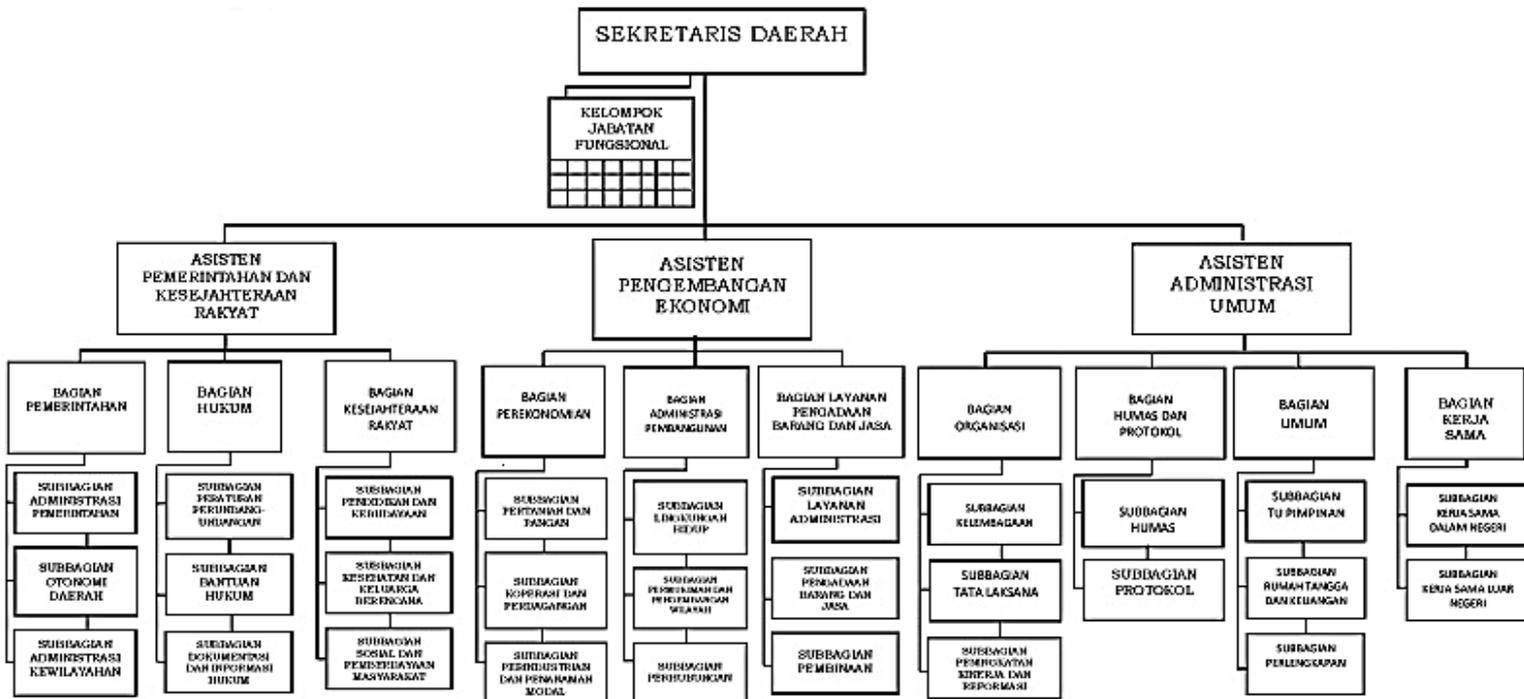
Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

Berikut adalah struktur organisasi yang terdapat di Sekretariat Daerah Kota Surakarta:

Bagan 2.2.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta



WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

2.2.3. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan ataupun kantor. Dinas Daerah yang terdapat di Kota Surakarta terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- n. Dinas Koperasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- q. Dinas Kebudayaan;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Perdagangan;
- u. Dinas Pemadam Kebakaran; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota Surakarta terdiri dari:

- a) Inspektorat
- b) Badan Badan Pendapatan
- c) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- d) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2.2.4. Kecamatan dan Kelurahan

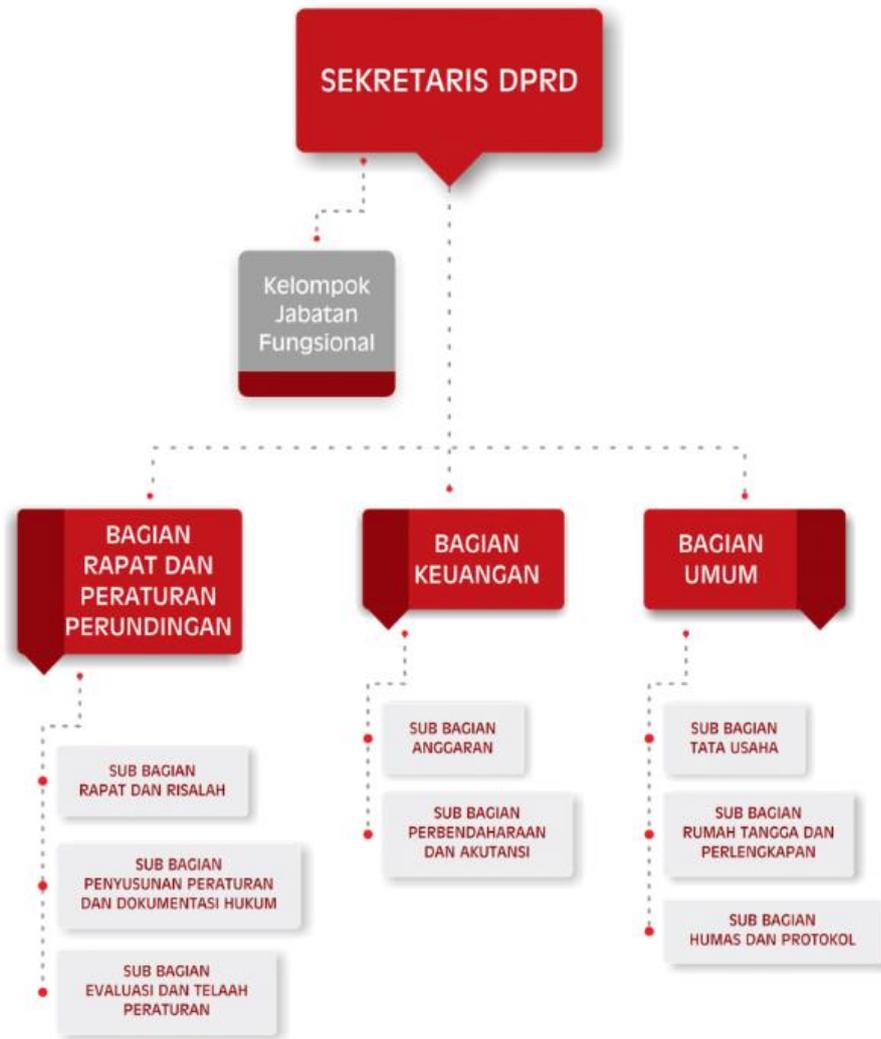
Kota Surakarta secara administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan. Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

2.2.5. Sekretariat Dewan

Struktur organisasi DPRD juga dilengkapi dengan dibentuknya Sekretariat Dewan (Setwan) yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Berikut adalah bagan organisasi sekretariat dewan Kota Surakarta:

Bagan 2.3.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Kota Surakarta



Sumber: dprd.surakarta.go.id

2.3. Lembaga Legislatif Daerah Kota Surakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta merupakan lembaga legislatif yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Surakarta. DPRD Kota Surakarta periode 2014 - 2019 menempatkan wakilnya yang berjumlah 45 orang

berdasarkan dari tujuh daerah pemilihan. Berikut merupakan jumlah anggota DPRD Kota Surakarta berdasarkan komposisi jumlah partai:

Tabel 2.4.

Komposisi Jumlah partai

DPRD Kota Surakarta 2014-2019	
Partai	Kursi
<u>PDI-P</u>	24
<u>PKS</u>	5
<u>Partai Golkar</u>	4
<u>PAN</u>	4
<u>Partai Gerindra</u>	3
<u>Partai Demokrat</u>	3
<u>Partai Hanura</u>	1
<u>PPP</u>	1
Total	45

Sumber: dprd.surakarta.go.id

2.3.1. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Surakarta

A. Fungsi:

- a. Legislasi yaitu membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Gubernur.
- b. Anggaran yaitu dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Gubernur.
- c. Pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Ketiga Fungsi Tersebut merupakan wujud dari kerangka representasi masyarakat.

B. Tugas dan Wewenang:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

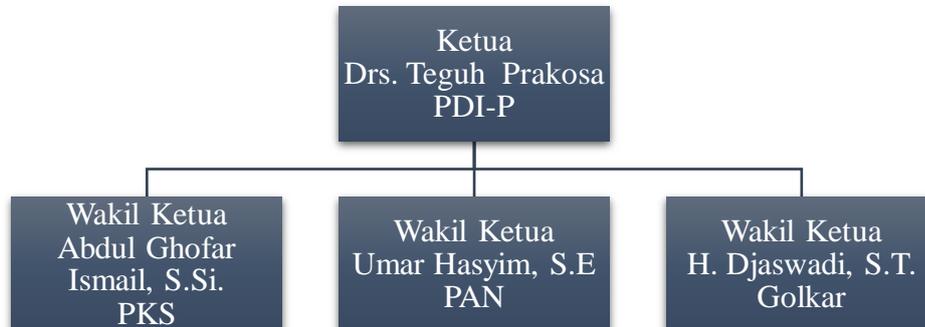
2.3.2. Alat Kelengkapan

1) Pimpinan

Pimpinan DPRD mempunyai tugas memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua, melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD. Berikut merupakan struktur pimpinan yang terdapat di DPRD Kota Surakarta:

Bagan 2.4.

Struktur Pimpinan DPRD Kota Surakarta



Sumber: dprd.surakarta.go.id

2) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah

anggota dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan fraksi.

3) Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Masing masing komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermitra dengan SKPD yang membidangi. Komisi DPRD meliputi:

- a) Komisi I: Bidang Pemerintahan;
- b) Komisi II: Bidang Pembangunan;
- c) Komisi III: Bidang Perekonomian;
- d) Komisi IV: Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4) Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD, mengoordinasi untuk penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

5) Badan Anggaran

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok - pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

- b) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Walikota;
- d) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota;
- f) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
- g) Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Tabel 2.5.

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Drs. Teguh Prakosa	Ketua	F PDI-P
2.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Wkl Ketua	F PKS
3.	Umar Hasyim, SE	Sekretaris	F PAN
4.	H. Djaswadi,ST	Anggota	F P G
5.	Budi Prasetyo, S.SOs	Anggota	F PDI-P
6.	Siti Muslikah, S.Sos	Anggota	F PDI-P
7.	Suharsono, SH. MH	Anggota	F PDI-P
8.	YF. Sukasno, SH	Anggota	F PDI-P
9.	Janjang Sumaryono Aji, SP	Anggota	F PDI-P
10.	Putut Gunawan	Anggota	F PDI-P
11.	Honda Hendarto	Anggota	F PDI-P
12.	Ekya Sih Hananto, SH	Anggota	F PDI-P
13.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	F PDI-P
14.	Hartanti, SE	Anggota	F PDI-P
15.	Dipl. Ing.H.Quatly AbdulkadirA	Anggota	F PKS
16.	Sugeng Riyanto, S.S	Anggota	F PKS
17.	Drs. H. Achmad sapari, MM	Anggota	F PAN
18.	Hj. Maria Sri Sumarni, SE. MM	Anggota	F P G
19.	Supriyanto, SH	Anggota	F D N R
20.	Abdullah AA	Anggota	F D N R
21.	Ardianto Kuswinarno, SH	Anggota	F PIR
22.	M. Irawan Purnomo, SH. MM	Anggota	F PIR
23.	Tri Puguh Priyadi, SH.MM	Sek Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

Sumber: DPRD Kota Surakarta

6) Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Selain itu, Badan Kehormatan juga meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD.

2.3.3. Daftar Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2014 – 2019

Tabel 2.6.

Daftar Anggota DPRD Kota Surakarta

NO	NAMA	FRAKSI
1.	Teguh Prakosa	PDIP
2.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	PKS
3.	Umar Hasyim, S.E.	PAN
4.	H. Djaswadi, S.T.	Golkar
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDIP
6.	Hartanti	PDIP
7.	Putut Gunawan	PDIP
8.	Budi Prasetyo, S.Sos.	PDIP
9.	Janjang Sumaryono Aji S.P.	PDIP
10.	Siti Muslikah	PDIP
11.	Kristianto	PDIP
12.	H. Maryuwono, S.H.	PDIP
13.	EH. Heni Nogogini, S.H., M.H.	PDIP
14.	Suharsono, S.H., M.H.	PDIP
15.	Slamet Widodo	PDIP
16.	S.S. Putra, S.H., M.H.	PDIP
17.	Anna Budiarti, S.PAK.	PDIP
18.	Wawanto, S.H.	PDIP
19.	Honda Hendarto	PDIP
20.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos.	PDIP
21.	Yulianto Indratmoko	PDIP
22.	Elizabeth Pujiningati	PDIP
23.	Drs. Paulus Haryoto	PDIP
24.	Suyatno	PDIP
25.	Ekya Sih Hananto, S.H.	PDIP
26.	Ginda Feractriawan, S.E., M.Si	PDIP
27.	S. Rony Kamtoro	PDIP
28.	Asih Sunjoto Putro, S.Si	PKS
29.	H. Sugeng Riyanto, S.S.	PKS
30.	Muhadi Syahrone, S.T.	PKS
31.	Dipl. Ing. H. Quatly A. Alkatiri	PKS
32.	H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN
33.	H. Sugiyarsono	PAN

34.	Drs. H. Achmad Sapari, M.M.	Golkar
35.	Hj. Maria Sri Sumarmi, S.E., M.M.	Golkar
36.	Drs. Bambang Triyanto, M.M.	Golkar
37.	Drs. Taufiqurrahman	Golkar
38.	Supriyanto, S.H.	Demokrat
39.	Hj. Reny Widyawati, S.E.	Demokrat
40.	Abdullah A.A.	Demokrat
41.	Suranto, S.E.	Demokrat
42.	M. Irawan Purnomo, S.H., M.H.	Persatuan Indonesia Raya
43.	H.M. Edy Jasmanto, S.H.	Persatuan Indonesia Raya
44.	Nur Rochmi Kurniasari, S.Pd.	Persatuan Indonesia Raya
45.	Ardianto Kuswinarno, S.H.	Persatuan Indonesia Raya

Sumber: DPRD Kota Surakarta